

Analisis Implementasi Perencanaan Pembelajaran Responsif Gender sebagai Instrumen Kebijakan untuk Kesetaraan Pendidikan

Heni Suhertini^{1*}, Mulyawan Safwandy Nugraha²

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat Indonesia

*Corresponding E-mail: henisuhertini@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.70287/epistemic.v5i2.528>

Diterima: 07-04-2026 | Direvisi: 07-04-2026 | Diterbitkan: 31-05-2026

Abstract

Gender equity in education is not merely determined by policies but by how they are translated into classroom practices. Gender-responsive lesson planning is a strategic policy instrument for fostering equitable and inclusive learning in madrasah education. This study aims to analyze the implementation of gender-responsive lesson planning, the practice of gender equity in classroom learning, and the relationship between both. A quantitative approach with a correlational design was employed. Data were collected through standardized questionnaires administered to teachers and students, then analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The findings indicate that the implementation of gender-responsive lesson planning is at a high level, while gender equity practices are consistently applied. Correlational analysis reveals a strong and significant positive relationship between the quality of lesson planning and the realization of gender equity in classroom practices ($r = 0.78, p < 0.05$). These results suggest that well-designed, gender-responsive lesson planning plays a crucial role in promoting educational equity. The study implies that strengthening policy-oriented lesson planning, supported by institutional commitment and continuous teacher capacity development, is essential for creating inclusive and gender-equitable learning environments in madrasah education
Keywords: education policy, gender equity, gender-responsive lesson planning, madrasah learning, policy instrument.

Abstrak:

Kesetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh penerjemahannya ke dalam praktik pembelajaran. Perencanaan pembelajaran responsif gender dipandang sebagai instrumen kebijakan strategis untuk menciptakan proses belajar yang adil dan inklusif di madrasah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perencanaan pembelajaran berperspektif gender, praktik kesetaraan gender dalam pembelajaran, serta hubungan keduanya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Data dikumpulkan melalui angket terstandar kepada guru dan peserta didik, lalu dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan implementasi perencanaan pembelajaran responsif gender berada pada kategori tinggi, dan praktik kesetaraan gender berlangsung konsisten. Analisis korelasional mengungkap hubungan positif kuat dan signifikan antara kualitas perencanaan pembelajaran dengan terwujudnya kesetaraan gender dalam praktik kelas ($r = 0,78, p < 0,05$). Temuan ini mengimplikasikan bahwa penguatan perencanaan pembelajaran berbasis kebijakan responsif gender merupakan langkah penting mendorong keadilan pendidikan. Dukungan kelembagaan dan peningkatan kapasitas guru menjadi faktor kunci menciptakan lingkungan pembelajaran madrasah yang inklusif dan berkeadilan gender.

Kata Kunci: instrumen kebijakan, kebijakan pendidikan, kesetaraan gender, pembelajaran madrasah, perencanaan pembelajaran responsif gender.

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam pendidikan semakin mendapatkan perhatian dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya keadilan dan inklusivitas dalam sistem pendidikan. Dalam kerangka global, upaya mendorong kesetaraan gender menjadi bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menempatkan pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender sebagai prioritas utama. Namun demikian, meskipun komitmen terhadap kesetaraan gender semakin menguat, implementasinya dalam praktik pendidikan sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks (McHolm & Devall-Martin, 2026). Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan tidak selalu tampak secara eksplisit dalam bentuk perbedaan akses atau partisipasi, tetapi sering kali muncul secara terselubung dalam praktik pembelajaran di kelas. Bentuk-bentuk bias ini dapat terlihat dalam interaksi guru dengan siswa, pemilihan materi ajar, penggunaan contoh pembelajaran, hingga ekspektasi terhadap capaian belajar berdasarkan jenis kelamin (Guinto, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan kebijakan makro, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh praktik mikro yang terjadi dalam ruang kelas.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kesetaraan gender telah diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan, implementasinya pada level pembelajaran masih sering bersifat normatif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pedagogis (Cin et al., 2025). Dalam banyak kasus, kebijakan yang dirumuskan pada tingkat nasional tidak selalu diterjemahkan secara efektif dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Hal ini mengindikasikan adanya jarak antara kebijakan sebagai dokumen formal dengan realitas implementasinya di lapangan (Enachescu, 2026). Dalam konteks pendidikan madrasah, persoalan ini menjadi semakin menarik untuk dikaji. Madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, pembelajaran di madrasah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, termasuk kesetaraan gender. Namun, di sisi lain, konteks sosial dan budaya yang melingkupi madrasah juga dapat memengaruhi bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam praktik pembelajaran (Yanasari et al., 2026). Budaya patriarkal yang masih kuat di beberapa komunitas dapat menjadi hambatan serius bagi upaya mewujudkan pembelajaran yang adil gender.

Salah satu aspek penting yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam kajian kesetaraan gender adalah perencanaan pembelajaran. Dalam praktiknya, perencanaan pembelajaran sering dipandang sebagai dokumen

administratif yang disusun untuk memenuhi tuntutan formal, seperti penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Padahal, perencanaan pembelajaran memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah dan kualitas pembelajaran. Apa yang direncanakan oleh guru pada tahap awal akan sangat memengaruhi bagaimana pembelajaran dilaksanakan di kelas (Sass & Edmark, 2026). Ketika perencanaan pembelajaran tidak mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, maka terdapat kemungkinan bahwa praktik pembelajaran yang dihasilkan juga akan mengandung bias, baik secara sadar maupun tidak. Sebaliknya, perencanaan yang dirancang dengan perspektif gender yang sensitif dapat menjadi dasar bagi terciptanya pembelajaran yang lebih inklusif dan adil (Singh Hooda, 2026). Dengan demikian, perencanaan pembelajaran dapat dipahami sebagai titik awal yang menentukan apakah nilai-nilai kesetaraan gender benar-benar hadir dalam praktik pembelajaran. Perencanaan yang baik mencerminkan pemahaman guru tentang pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, terlepas dari jenis kelamin mereka.

Meskipun penting, kajian yang secara khusus menempatkan perencanaan pembelajaran sebagai instrumen kebijakan dalam mendorong kesetaraan gender masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek praktik pembelajaran, persepsi guru, atau budaya sekolah (Pratiwi & Ximenes, 2026). Padahal, perencanaan pembelajaran merupakan ruang strategis di mana kebijakan pendidikan diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional. Oleh karena itu, mengkaji perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari implementasi kebijakan menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan kesetaraan gender bekerja pada level mikro (Shopina, 2026). Selain itu, penelitian yang mengkaji hubungan antara kualitas perencanaan pembelajaran responsif gender dengan praktik kesetaraan dalam pembelajaran secara kuantitatif juga masih terbatas, khususnya dalam konteks pendidikan madrasah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, terutama untuk memberikan bukti empiris mengenai bagaimana perencanaan pembelajaran berkontribusi terhadap praktik kesetaraan gender di kelas (Eustacchi, 2026). Tanpa bukti empiris yang kuat, kebijakan cenderung hanya bersifat simbolis dan tidak berdampak nyata pada perubahan perilaku guru di kelas.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini berupaya menawarkan perspektif yang berbeda dengan memposisikan perencanaan pembelajaran sebagai instrumen kebijakan mikro yang berperan dalam menjembatani antara kebijakan pendidikan dan praktik pembelajaran. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik sehari-hari (Aina, 2025). Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada

upaya mengkaji perencanaan pembelajaran responsif gender tidak hanya sebagai aspek teknis, tetapi sebagai bagian dari mekanisme implementasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris dengan menganalisis hubungan antara perencanaan pembelajaran dan praktik kesetaraan gender secara kuantitatif, yang masih jarang dilakukan dalam konteks madrasah (Duong & Nguyen, 2026). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perencanaan pembelajaran responsif gender, mengidentifikasi praktik kesetaraan gender dalam pembelajaran, serta mengkaji hubungan antara kedua aspek tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan bukti empiris yang dapat memperkuat pemahaman bahwa perencanaan pembelajaran memiliki peran strategis dalam mendorong keadilan pendidikan. Dengan menempatkan perencanaan pembelajaran sebagai fokus kajian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori implementasi kebijakan pendidikan serta praktik pembelajaran yang lebih inklusif di madrasah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional untuk mengkaji hubungan antara implementasi kebijakan perencanaan pembelajaran berperspektif gender dan praktik kesetaraan dalam pembelajaran. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data dalam bentuk angka yang dapat dianalisis secara objektif dan sistematis. Sementara itu, desain korelasional digunakan untuk melihat sejauh mana keterkaitan antara dua variabel tanpa adanya intervensi atau manipulasi terhadap kondisi yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada pengungkapan pola hubungan yang terjadi secara alami dalam konteks pembelajaran di madrasah. Desain ini sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang hubungan antara perencanaan pembelajaran responsif gender (variabel X) dan praktik kesetaraan gender (variabel Y).

Penelitian dilaksanakan di MTs SA Miftahul Falah yang berlokasi di Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa madrasah tersebut telah mengimplementasikan kebijakan perencanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik. Selain itu, karakteristik madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai keagamaan memberikan nuansa tersendiri dalam penerapan prinsip kesetaraan gender dalam pembelajaran. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung sejak bulan Maret hingga Mei 2025. Waktu ini mencakup tahap perizinan, pengumpulan data, dan analisis awal.

Secara konseptual, penelitian ini memposisikan perencanaan pembelajaran responsif gender sebagai variabel bebas (X) yang diasumsikan memiliki hubungan terhadap praktik kesetaraan gender dalam pembelajaran sebagai variabel terikat (Y). Dalam kerangka ini, perencanaan pembelajaran dipahami tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai bagian dari proses implementasi kebijakan pada level mikro yang berperan penting dalam menentukan bagaimana pembelajaran dilaksanakan di kelas. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan perencanaan sebagai titik awal yang memengaruhi kualitas praktik pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembelajaran di madrasah tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, di mana seluruh populasi guru yang berjumlah 9 orang dijadikan responden penelitian. Pendekatan ini dipilih karena jumlah populasi relatif kecil, sehingga seluruh anggota populasi dapat dijangkau secara menyeluruh. Meskipun jumlah responden terbatas, penggunaan total sampling memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi yang diteliti. Namun demikian, keterbatasan jumlah sampel tetap menjadi perhatian, sehingga hasil penelitian ini lebih tepat dipahami dalam konteks lokasi penelitian dan tidak untuk digeneralisasi secara luas.

Selain guru, penelitian ini juga melibatkan 30 peserta didik sebagai responden tambahan yang dipilih secara purposive sampling. Keterlibatan siswa dimaksudkan untuk melengkapi data dari perspektif guru dengan menghadirkan pengalaman langsung yang dirasakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan melibatkan dua sumber data yang berbeda, penelitian ini berupaya meningkatkan keakuratan temuan melalui pendekatan triangulasi sumber. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen berupa angket tertutup yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Angket untuk variabel perencanaan pembelajaran responsif gender dirancang untuk mengukur sejauh mana guru mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam penyusunan tujuan pembelajaran, pemilihan materi, serta strategi pembelajaran yang digunakan. Angket ini terdiri dari 20 butir pernyataan dengan skala Likert 1–5. Sementara itu, angket untuk variabel praktik kesetaraan gender berfokus pada pengalaman responden terkait perlakuan yang adil, kesempatan berpartisipasi yang setara, serta interaksi pembelajaran yang bebas dari bias gender dengan 20 butir pernyataan.

Sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama, instrumen penelitian terlebih dahulu melalui tahap pengujian untuk memastikan kualitasnya. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment Pearson pada 20 responden di luar sampel. Hasil uji menunjukkan bahwa semua butir pernyataan memiliki r hitung $>$ r tabel (0,444) pada signifikansi 0,05, sehingga dinyatakan valid. Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach's Alpha.

Nilai alpha untuk variabel X sebesar 0,89 dan variabel Y sebesar 0,92, keduanya > 0,70, sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari koordinasi dengan pihak madrasah, sosialisasi kepada responden, pembagian angket dengan pendampingan, hingga pengecekan kelengkapan data. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan: pemeriksaan data, pengkodean, penyusunan tabel, analisis deskriptif (rata-rata, median, standar deviasi), dan analisis inferensial menggunakan uji korelasi Pearson dengan bantuan SPSS versi 25. Uji signifikansi dilakukan pada taraf $\alpha = 0,05$. Sebelum uji korelasi, dilakukan uji asumsi normalitas (Kolmogorov-Smirnov) dan linearitas (scatter plot). Hasil uji normalitas menunjukkan nilai $p > 0,05$, dan plot linearitas menunjukkan pola yang linear. Aspek etis juga menjadi perhatian: seluruh responden berpartisipasi secara sukarela setelah menandatangani informed consent, identitas dijaga kerahasiaannya, dan data hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data kuantitatif mengenai implementasi kebijakan perencanaan pembelajaran berperspektif gender dan praktik kesetaraan dalam pembelajaran di MTs SA Miftahul Falah. Penyajian hasil difokuskan pada deskripsi masing-masing variabel penelitian serta analisis hubungan antarvariabel, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Selain itu, bagian ini juga memaparkan temuan tambahan yang diperoleh selama proses pengumpulan data sebagai pelengkap interpretasi hasil utama.

1. Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembelajaran Berperspektif Gender

Hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perencanaan pembelajaran berperspektif gender berada pada kategori tinggi. Penilaian ini didasarkan pada skor total angket yang diisi oleh guru, yang mencerminkan tingkat penerapan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran responsif gender dalam berbagai aspek, seperti penyusunan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, penggunaan contoh pembelajaran yang netral gender, serta perencanaan strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan setara bagi peserta didik laki-laki dan perempuan. Skor maksimal yang mungkin diperoleh adalah 200 (20 butir x 10 skor maksimal per butir setelah penimbangan). Namun, dalam penelitian ini skor yang dilaporkan adalah skor mentah yang telah dikonversi ke skala 0-200.

Tabel 1.
Skor Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembelajaran Berperspektif Gender (X)

Responden	Skor Total
R1	153
R2	144
R3	152
R4	151
R5	144
R6	159
R7	142
R8	128
R9	141

Sumber: Hasil angket

Berdasarkan data pada Tabel 1, skor total responden berada pada rentang 128 hingga 159 dari skor maksimal ideal 200. Nilai minimum sebesar 128 menunjukkan bahwa seluruh responden tetap berada pada kategori cukup hingga tinggi (kategori: <100 = rendah, 100-140 = cukup, >140 = tinggi), sementara nilai maksimum sebesar 159 menunjukkan tingkat implementasi yang sangat baik. Mayoritas responden (7 dari 9 guru) memperoleh skor di atas nilai rata-rata, yang mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran responsif gender dilakukan secara konsisten oleh guru di madrasah tersebut. Distribusi skor menunjukkan bahwa sebagian besar guru memiliki kecenderungan yang seragam dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan pembelajaran. Hanya satu responden (R8) yang memiliki skor mendekati batas bawah kategori cukup, namun hal tersebut tidak secara signifikan memengaruhi kecenderungan umum implementasi kebijakan yang berada pada kategori tinggi.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif Variabel X

Statistik	Nilai
Jumlah responden (N)	9
Skor minimum	128
Skor maksimum	159
Rata-rata (Mean)	145,67
Median	144
Modus	144
Kuartil 1 (Q1)	142

Statistik	Nilai
Kuartil 3 (Q3)	152
Standar deviasi (SD)	9,22

Sumber: Hasil rekap angket

Analisis statistik deskriptif pada Tabel 2 memperkuat temuan tersebut. Nilai rata-rata (mean) sebesar 145,67 menunjukkan bahwa secara umum tingkat implementasi kebijakan perencanaan pembelajaran berperspektif gender berada pada kategori tinggi. Nilai median sebesar 144 yang relatif dekat dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa distribusi data cenderung simetris atau tidak menceng. Selain itu, nilai kuartil pertama (Q1) sebesar 142 dan kuartil ketiga (Q3) sebesar 152 menunjukkan bahwa sebagian besar data (50% tengah) berada dalam rentang yang tidak terlalu lebar, yaitu antara 142 hingga 152. Nilai standar deviasi sebesar 9,22 menunjukkan bahwa variasi skor antarresponden relatif kecil jika dibandingkan dengan rentang skor (128-159). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat implementasi kebijakan perencanaan pembelajaran berperspektif gender cenderung merata di antara guru. Dengan kata lain, tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara guru dalam hal penerapan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran responsif gender. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di madrasah telah dipahami dan diimplementasikan secara konsisten oleh sebagian besar guru. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa perencanaan pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif, tetapi telah berfungsi sebagai instrumen pedagogis yang digunakan secara nyata dalam merancang pembelajaran yang inklusif. Integrasi prinsip kesetaraan gender dalam tahap perencanaan menunjukkan adanya kesadaran profesional guru dalam menciptakan pembelajaran yang adil bagi seluruh peserta didik.

2. Praktik Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik kesetaraan gender dalam pembelajaran berada pada kategori tinggi. Penilaian terhadap variabel ini diperoleh dari angket yang mengukur pengalaman responden (guru dan siswa) terkait perlakuan adil dalam pembelajaran, kesempatan partisipasi yang seimbang, interaksi kelas yang bebas dari bias gender, serta penggunaan bahasa dan materi pembelajaran yang nondiskriminatif. Data yang diperoleh dari 30 siswa menunjukkan skor rata-rata sebesar 148,5 (dari skor maksimal 200) dengan standar deviasi 10,3, sementara dari 9 guru diperoleh skor rata-rata 150,2. Jika digabungkan, rata-rata total sebesar 149,1 yang termasuk dalam kategori tinggi. Sebagian besar responden (85% siswa dan 89% guru) merasakan adanya perlakuan yang adil dalam proses pembelajaran. Kesempatan untuk bertanya, menjawab pertanyaan, serta terlibat dalam aktivitas pembelajaran diberikan secara relatif

seimbang kepada peserta didik laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang tidak diskriminatif. Selain itu, penggunaan contoh dan ilustrasi dalam pembelajaran juga dinilai tidak menunjukkan kecenderungan pada salah satu jenis kelamin. Guru cenderung menggunakan pendekatan yang netral gender dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga tidak memperkuat stereotip tertentu. Dalam aspek interaksi kelas, responden juga menyatakan bahwa komunikasi antara guru dan siswa berlangsung secara adil tanpa membedakan jenis kelamin. Guru memberikan perhatian yang seimbang kepada seluruh peserta didik serta menghindari perlakuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Secara keseluruhan, hasil pengukuran variabel praktik kesetaraan gender menunjukkan bahwa pembelajaran di madrasah telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas.

3. Hasil Uji Korelasi antara Implementasi Perencanaan dan Praktik Kesetaraan

Analisis hubungan antara implementasi kebijakan perencanaan pembelajaran berperspektif gender (X) dan praktik kesetaraan dalam pembelajaran (Y) dilakukan menggunakan uji korelasi Pearson. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara kedua variabel penelitian. Secara statistik, nilai koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan bahwa peningkatan skor pada variabel implementasi perencanaan pembelajaran diikuti oleh peningkatan skor pada variabel praktik kesetaraan gender. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru, semakin tinggi pula tingkat kesetaraan gender yang terwujud dalam praktik pembelajaran. Hasil uji korelasi menunjukkan nilai koefisien sebesar $r = 0,78$ dengan tingkat signifikansi $p = 0,014$ ($p < 0,05$). Nilai koefisien korelasi tersebut berada pada kategori kuat (menurut interpretasi: 0,00-0,19 sangat lemah; 0,20-0,39 lemah; 0,40-0,59 sedang; 0,60-0,79 kuat; 0,80-1,00 sangat kuat). Sementara itu, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik dan tidak terjadi secara kebetulan. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa perencanaan pembelajaran berperspektif gender memiliki peran yang penting dalam menentukan kualitas praktik pembelajaran. Dengan kata lain, perencanaan pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai tahap awal dalam proses pembelajaran, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi bagaimana pembelajaran dilaksanakan di kelas.

Selain hasil utama yang diperoleh melalui analisis angket, penelitian ini juga mencatat beberapa temuan tambahan yang diperoleh melalui observasi dan catatan selama proses pengumpulan data. Temuan tambahan ini memberikan konteks yang lebih luas dalam memahami hasil penelitian. Salah satu temuan penting adalah adanya dukungan dari pimpinan madrasah dalam mendorong implementasi

kebijakan perencanaan pembelajaran responsif gender. Dukungan ini terlihat dalam bentuk kebijakan internal, arahan kepala madrasah, serta supervisi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dukungan kelembagaan ini menjadi faktor penting yang memperkuat konsistensi implementasi kebijakan di tingkat guru. Selain itu, budaya sekolah yang mendorong kerja sama antara peserta didik laki-laki dan perempuan juga menjadi faktor pendukung terciptanya praktik kesetaraan gender. Interaksi yang harmonis antara siswa menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan telah terinternalisasi dalam lingkungan sekolah. Namun demikian, beberapa responden juga mengungkapkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam memahami dan menerapkan konsep pembelajaran responsif gender secara lebih mendalam. Pelatihan dan pengembangan profesional dianggap penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Temuan tambahan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu guru, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan dan budaya sekolah.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami secara lebih mendalam makna dari temuan empiris mengenai implementasi kebijakan perencanaan pembelajaran berperspektif gender serta hubungannya dengan praktik kesetaraan dalam pembelajaran di madrasah. Bagian ini tidak hanya mengulang hasil penelitian, tetapi berupaya menafsirkan temuan secara kritis dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis implementasi kebijakan pendidikan dan teori pendidikan responsif gender, sekaligus membandingkannya dengan temuan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perencanaan pembelajaran responsif gender berada pada kategori tinggi dan berjalan seiring dengan praktik kesetaraan gender dalam pembelajaran yang juga berada pada kategori tinggi. Temuan ini mengindikasikan adanya kesinambungan antara apa yang dirancang oleh guru dalam tahap perencanaan dengan apa yang benar-benar terjadi dalam praktik pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, kondisi ini tidak selalu mudah ditemukan, karena sering kali terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Namun, dalam penelitian ini, kesenjangan tersebut relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa proses implementasi berjalan secara konsisten (Guinto, 2026). Keselarasan antara perencanaan dan praktik ini menunjukkan bahwa kebijakan kesetaraan gender tidak hanya dipahami sebagai wacana normatif, tetapi telah diinternalisasi dalam praktik pedagogis. Guru tidak hanya menyusun perencanaan sebagai kewajiban administratif, melainkan telah menjadikannya sebagai acuan nyata dalam mengelola pembelajaran. Hal ini

menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran telah berfungsi sebagai instrumen operasional yang menghubungkan kebijakan dengan praktik (McHolm & Devall-Martin, 2026). Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa instrumen kebijakan mikro seperti perencanaan pembelajaran memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan kebijakan makro (Islam et al., 2025).

Temuan penelitian ini tentang perencanaan pembelajaran responsif gender sebagai instrumen kebijakan mikro juga selaras dengan kerangka teoretis yang dikembangkan dalam literatur buku internasional terkemuka. Raewy (2004) menegaskan bahwa institusi pendidikan merupakan arena reproduksi sekaligus resistensi terhadap tatanan gender hegemonik, sehingga intervensi pada level perencanaan pedagogis menjadi sangat strategis. Unterhalter (2006) mengkritisi kebijakan makro yang kerap kehilangan akar pada praktik kelas, dan menawarkan pendekatan implementasi berbasis agensi guru sebagai pemegang kunci perubahan. Sementara itu, Stromquist (2006) menyoroti pentingnya *hidden curriculum* dan perangkat kebijakan mikro seperti RPP untuk mendetoksifikasi bias gender dalam pembelajaran.

Lebih lanjut, Aikman & Rao (2012) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kesetaraan sangat ditentukan oleh sejauh mana guru memiliki otonomi dan kapasitas merancang pembelajaran yang peka gender. Skelton et al (2006) mendokumentasikan secara empiris bagaimana bias tak sadar guru dalam perencanaan dan interaksi kelas melanggengkan kesenjangan, dan merekomendasikan pelatihan berkelanjutan. Terakhir, Amin & Wachidah (2023) menyediakan model konkret pengintegrasian gender ke dalam seluruh siklus pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, yang relevansinya kuat dengan konteks madrasah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan empiris dari artikel jurnal, tetapi juga mengonfirmasi dan memperkaya kerangka konseptual yang telah dibangun dalam kepustakaan buku internasional tentang pendidikan responsif gender

Dari perspektif implementasi kebijakan, perencanaan pembelajaran dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi kebijakan yang konkret. Melalui perencanaan tersebut, guru menerjemahkan kebijakan kesetaraan gender ke dalam bentuk yang lebih operasional, seperti tujuan pembelajaran, materi ajar, dan strategi pembelajaran. Tingginya tingkat implementasi menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan berjalan dengan baik dan dipahami oleh guru sebagai pelaksana utama (Cin et al., 2025). Selain aspek komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana juga berperan penting. Guru yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan gender cenderung lebih mampu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan implementasi

kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan, tetapi juga oleh komitmen dan kapasitas pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata (Enachescu, 2026). Dalam penelitian ini, komitmen tersebut terlihat dari konsistensi antara perencanaan dan praktik pembelajaran. Lebih lanjut, temuan tambahan tentang dukungan kepala madrasah mengonfirmasi bahwa struktur birokrasi dan kepemimpinan yang responsif gender menjadi faktor pendukung yang signifikan (Pratiwi & Ximenes, 2026).

Dari perspektif teori gender, temuan ini menguatkan pandangan bahwa kesetaraan tidak dapat dicapai hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan. Guinto (2026) menegaskan bahwa bias gender sering kali terinternalisasi dalam desain pembelajaran, baik dalam pemilihan materi, penggunaan contoh, maupun pengorganisasian aktivitas kelas. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran yang sensitif gender menjadi instrumen penting untuk mencegah reproduksi bias tersebut. Dalam praktiknya, bias gender sering muncul dalam bentuk yang tidak disadari, seperti penggunaan contoh yang stereotipikal atau pembagian peran yang tidak seimbang dalam aktivitas kelompok. Dengan adanya perencanaan pembelajaran yang responsif gender, potensi bias ini dapat diminimalkan sejak awal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa guru telah mampu mengantisipasi hal tersebut melalui perencanaan yang lebih inklusif, sehingga praktik pembelajaran yang terjadi cenderung lebih adil (Sass & Edmark, 2025). Selain itu, hasil uji korelasi yang kuat ($r = 0,78$) mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas perencanaan akan secara langsung diikuti oleh peningkatan praktik kesetaraan. Pola hubungan ini sejalan dengan temuan Ibourk & El Aynaoui (2025) di Maroko, yang menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam capaian belajar sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembelajaran di tingkat kelas.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi sekaligus memberikan kontribusi baru. Penelitian oleh Guinto (2026) di Filipina menunjukkan bahwa pedagogi responsif gender memiliki efek yang ekstrem terhadap promosi kesetaraan belajar. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembelajaran memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran dapat dijadikan sebagai indikator empiris dalam menilai implementasi kesetaraan gender. Di sisi lain, studi oleh McHolm & Devall-Martin (2026) di Ethiopia menekankan pentingnya pendekatan yang digerakkan oleh komunitas. Penelitian kami melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks madrasah, faktor internal sekolah (perencanaan guru) dan dukungan eksternal (kepala madrasah) sama-sama berperan. Temuan ini juga sejalan dengan laporan ILO (2025) yang menyatakan bahwa tanpa integrasi gender dalam kerangka kebijakan ketenagakerjaan, upaya kesetaraan cenderung tidak

berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, integrasi gender dalam perencanaan pembelajaran adalah bentuk konkret dari kebijakan berkelanjutan tersebut.

Dalam konteks nasional, penelitian oleh Singh Hooda (2026) India menunjukkan bahwa pendekatan penganggaran responsif gender dapat membuat pengeluaran publik menjadi lebih adil. Hasil penelitian ini memperkuat gagasan bahwa perencanaan pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan teknis, tetapi juga sebagai faktor prediktif terhadap praktik kesetaraan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dalam literatur dengan menempatkan perencanaan pembelajaran sebagai variabel yang memiliki peran strategis (Rani & Hemrajani, 2025). Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan penghubung antara kebijakan dan praktik. Selama ini, banyak kajian implementasi kebijakan lebih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan atau budaya sekolah. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal yang menentukan bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik (Shopina, 2026). Penelitian ini juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana guru sebagai aktor kebijakan mikro dapat menjadi agen perubahan yang efektif jika didukung oleh perencanaan yang matang (Septania & Riyanto, 2025).

Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan. Temuan tambahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan kepala madrasah dan budaya sekolah yang inklusif turut memperkuat praktik kesetaraan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dan konteks sosial (Duong & Nguyen, 2026). Tanpa dukungan kelembagaan, upaya yang dilakukan oleh guru mungkin tidak akan berjalan secara optimal. Penelitian oleh Yanasari et al (2026) di Lombok juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak dalam budaya tertentu dapat menghambat kesetaraan gender, sehingga intervensi melalui perencanaan pembelajaran yang sensitif budaya menjadi sangat penting. Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap adanya tantangan dalam implementasi pembelajaran responsif gender. Beberapa guru masih membutuhkan penguatan pemahaman mengenai konsep kesetaraan gender serta cara mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktik sudah berjalan cukup baik, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut (Eustacchi, 2026)). Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas guru, seperti yang direkomendasikan oleh studi Struk (2025) tentang penganggaran responsif gender yang memerlukan peningkatan kompetensi aparat.

Implikasi praktis dari temuan ini cukup jelas. Jika ingin memperkuat kesetaraan gender dalam pendidikan, maka intervensi tidak cukup hanya pada

kebijakan makro, tetapi perlu difokuskan pada praktik mikro, khususnya pada perencanaan pembelajaran. Program pelatihan guru perlu diarahkan pada penguatan kemampuan dalam menyusun perencanaan yang sensitif gender (Aina, 2025). Selain itu, supervisi akademik juga perlu memastikan bahwa perencanaan yang disusun benar-benar diimplementasikan dalam praktik. Penelitian oleh Corrêa et al., (2025) tentang glass ceiling di perusahaan publik juga menunjukkan bahwa tanpa kebijakan internal yang responsif, kesenjangan kepemimpinan gender akan terus berlanjut. Analogi ini relevan dengan konteks madrasah: tanpa perencanaan yang responsif gender, kesenjangan dalam partisipasi dan capaian belajar siswa laki-laki dan perempuan akan sulit diatasi.

Temuan penelitian ini yang menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan praktik kesetaraan gender, meskipun hubungan keduanya kuat, sejalan dengan berbagai studi lintas sektor. Dalam konteks ketahanan iklim, misalnya, Chowdhury et al (2026) menemukan bahwa kebijakan nasional Bangladesh telah membuat komitmen gender tetapi tidak memiliki mekanisme penegakan, koordinasi, dan penganggaran responsif gender, sehingga program adaptasi di tingkat komunitas gagal meningkatkan otoritas keputusan perempuan—mirip dengan temuan kami bahwa perencanaan yang baik pun masih memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat (Pratiwi & Ximenes, 2026).

Ironi serupa juga terlihat di sektor energi bersih Coldrey et al (2026), kehutanan (Erol & Şahin, 2026), dan sumber daya air (Munyayi et al., 2026), di mana ketiadaan alokasi anggaran gender, kurangnya pelatihan formal, serta lemahnya kapasitas institusi menjadi penghalang utama, persis seperti yang diungkap guru madrasah kami tentang perlunya penguatan kapasitas. Bahkan di sektor perikanan Filipina (Durano et al., 2025) dan pertambangan (Arcede et al., 2026), kebijakan yang responsif gender pun gagal diterjemahkan karena konstruksi sosial patriarkal yang membatasi mobilitas ekonomi dan partisipasi perempuan. Hal ini mengonfirmasi bahwa tantangan implementasi kebijakan kesetaraan bersifat struktural lintas sektor, termasuk di pendidikan madrasah, di mana perencanaan pembelajaran responsif gender tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai perubahan budaya sekolah dan alokasi sumber daya yang memadai.

Namun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa intervensi yang dirancang secara spesifik dan kontekstual dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Di Rwanda dan Mozambik, pelatihan terstruktur tentang pedagogi responsif gender dan bermain berbasis pembelajaran (*play-based learning*) terbukti meningkatkan lingkungan kelas dan hasil belajar anak, meskipun efeknya sangat tergantung pada konteks seperti rasio guru-siswa dan dukungan kepemimpinan sekolah, sejalan dengan temuan kami tentang peran kunci kepala madrasah (Flink et al., 2024). Di Kenya, integrasi kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam

perencanaan energi membutuhkan pemahaman interseksionalitas, bukan hanya fokus pada gender semata (Fuchs et al., 2025). Pendekatan serupa juga berhasil dalam program ketahanan bencana di Aceh (Oktari et al., 2021) dan adaptasi iklim berkelanjutan di Ethiopia (Gebretsadik et al., 2026), di mana adopsi praktik ramah iklim meningkat signifikan ketika perencanaan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks pendidikan, studi tentang kepemimpinan virtual di Pakistan (Asad et al., 2025) dan desain indikator untuk kesetaraan gender di sekolah teknik Mediterania (Zabaniotou et al., 2021) menegaskan bahwa perencanaan yang disertai indikator terukur, pelatihan berkelanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan kunci dapat mengubah komitmen kebijakan menjadi praktik nyata. Oleh karena itu, untuk memperkuat perencanaan pembelajaran responsif gender di madrasah, perlu dikembangkan kerangka indikator spesifik (seperti yang dilakukan oleh Zabaniotou et al (2021), pelatihan guru berbasis bukti (seperti Flink et al., 2024), serta alokasi anggaran yang dilacak (seperti yang direkomendasikan Coldrey et al (2026) dan Roy & Xiaoling (2022) agar kesenjangan antara perencanaan dan implementasi dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara perencanaan pembelajaran dan praktik kesetaraan bukanlah sesuatu yang kebetulan. Hubungan tersebut merupakan hasil dari proses yang sistematis dan terstruktur, di mana perencanaan menjadi dasar bagi pelaksanaan pembelajaran. Ketika perencanaan disusun dengan baik, maka praktik yang dihasilkan pun cenderung berkualitas (Bladini & Svensson, 2025). Penelitian ini juga memperkuat temuan Tabbush & Howell (2025) bahwa alat akuntabilitas seperti scorecard dapat digunakan untuk menilai responsivitas gender, namun dalam konteks madrasah, instrumen yang paling mendasar adalah perencanaan pembelajaran itu sendiri. Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran berperspektif gender merupakan ruang strategis dalam implementasi kebijakan pendidikan. Guru sebagai aktor utama memiliki peran sentral dalam menentukan bagaimana kebijakan tersebut diwujudkan dalam pengalaman belajar siswa. Ketika guru memiliki kapasitas dan komitmen yang kuat, maka kebijakan kesetaraan gender tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar hadir dalam praktik pembelajaran sehari-hari (Eriyanti & Makmur, 2026). Penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan kerangka konseptual baru dalam kajian implementasi kebijakan pendidikan, di mana perencanaan pembelajaran diposisikan sebagai variabel kunci yang memediasi hubungan antara kebijakan makro dan praktik mikro (Wagon, 2026).

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana implementasi perencanaan pembelajaran berperspektif gender dijalankan di lingkungan madrasah, bagaimana praktik kesetaraan gender terwujud dalam proses pembelajaran, serta bagaimana hubungan antara kedua aspek tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran yang responsif gender telah diterapkan dengan cukup baik oleh guru, dan hal tersebut berjalan seiring dengan praktik pembelajaran yang menunjukkan kecenderungan inklusif serta adil bagi seluruh peserta didik. Temuan ini memberikan gambaran bahwa terdapat keterhubungan yang cukup erat antara apa yang dirancang oleh guru pada tahap awal pembelajaran dengan apa yang benar-benar terjadi dalam praktik di kelas. Dengan kata lain, perencanaan pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal yang disusun untuk memenuhi tuntutan administratif, tetapi telah berperan sebagai acuan nyata dalam mengelola proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi telah mulai terinternalisasi dalam praktik pedagogis sehari-hari. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan yang bersifat positif dan signifikan antara kualitas perencanaan pembelajaran dengan praktik kesetaraan gender ($r = 0,78$; $p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik perencanaan yang disusun oleh guru dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan, maka semakin besar pula kemungkinan terciptanya suasana pembelajaran yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran dapat dipahami sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas pengalaman belajar peserta didik.

Dalam konteks ini, perencanaan pembelajaran memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar persiapan teknis sebelum mengajar. Perencanaan dapat dilihat sebagai ruang awal di mana nilai-nilai kebijakan pendidikan diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih konkret. Apa yang dirancang dalam perencanaan akan sangat menentukan arah pembelajaran, mulai dari materi yang dipilih, strategi yang digunakan, hingga bentuk interaksi yang terjadi di kelas. Oleh karena itu, kualitas perencanaan menjadi salah satu kunci dalam memastikan bahwa pembelajaran berjalan secara adil dan inklusif. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan pembelajaran responsif gender sangat bergantung pada kesiapan guru dalam merancang pembelajaran yang sensitif terhadap isu kesetaraan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan perencanaan pembelajaran sebagai penghubung antara kebijakan dan praktik. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat kesetaraan gender dalam pendidikan tidak dapat hanya dilakukan melalui penyusunan kebijakan atau regulasi, tetapi perlu diikuti dengan penguatan

kapasitas guru, khususnya dalam merancang pembelajaran. Guru perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai mengenai konsep kesetaraan gender serta bagaimana mengintegrasikannya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

Selain itu, peran lembaga pendidikan juga tidak kalah penting. Dukungan dari pihak madrasah, baik dalam bentuk kebijakan internal maupun budaya sekolah yang inklusif, dapat memperkuat konsistensi implementasi pembelajaran responsif gender. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang cukup jelas, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini dilakukan pada satu lokasi dengan jumlah responden yang relatif terbatas, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, sehingga belum mampu menggali secara mendalam pengalaman subjektif guru dan siswa. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih komprehensif. Penelitian di masa mendatang dapat melibatkan lebih banyak satuan pendidikan dengan karakteristik yang beragam, serta menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Sebagai arah pengembangan, penelitian ini juga memberikan peluang untuk merancang model pembelajaran yang lebih sistematis dan terintegrasi dengan prinsip kesetaraan gender, khususnya dalam konteks madrasah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran berperspektif gender memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan gender perlu diarahkan pada penguatan perencanaan pembelajaran, peningkatan kapasitas guru, serta dukungan kelembagaan yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikman, S., & Rao, N. (2012). Gender equality and girls' education: Investigating frameworks, disjunctures and meanings of quality education. *Theory and Research in Education*, 10(3), 211–228. <https://doi.org/10.1177/1477878512459391>
- Aina, A. T. (2025). A "Fair" Tax System? Exploring the Disconnect Between Tax Policy and Gender Equality. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5151649>
- Amin, M. N., & Wachidah, K. (2023). Gender Responsive Pedagogy in Thematic Learning in Elementary Schools. *Mimbar Ilmu*, 28(1), 32–40. <https://doi.org/10.23887/mi.v28i1.55044>
- Arcede, R., Catle, J., Maglente, O., & Arcede, J. (2026). Invisible labor and unequal futures: Women's structural constraints in Philippine mining communities.

- The Extractive Industries and Society*, 25, 101786.
<https://doi.org/10.1016/j.exis.2025.101786>
- Asad, M. M., Ali, M., & Almusharraf, N. M. (2025). Impact of virtual leadership programs on TVET leaders' personalised learning and gender identity: Contextual insights from Pakistan. *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, 16(1), 152–169. <https://doi.org/10.1108/HESWBL-10-2024-0343>
- Bladini, M., & Svensson, E.-M. (2025). *Rethinking Online Anti-Gender Hate Speech: Legislation and Public Policy Making* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003383062>
- Borges Corrêa, R. R., Torres, M. M., & De Moraes Sousa, M. (2025). International Business Policy Influences on the Glass Ceiling: Symbolic Interactionism and Gender Equality (SDG 5) in Brazilian Public Organisations. In M. M. Torres, M. De Moraes Sousa, J. Traguette, T. Martínez Fernández, & E. Zubiria Ferriols (Eds.), *Impacts of International Business Policy on Gender Equality and Women's Empowerment* (pp. 151–174). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-3073-0.ch004>
- Chowdhury, R. I., Hossain, Md. A., & Ibn Farid, Z. (2026). Gender-responsive climate resilience through community-based adaptation: A policy-practice interface study in southern Bangladesh. *Progress in Disaster Science*, 30, 100568. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2026.100568>
- Cin, F. M., Akıllı, C., & Aydoğdu, E. (2025). The 100-Year Journey of Gender Equality in Educational Policymaking in Türkiye (1923–2023). In K. Arar, S. Turan, M. Elmeski, & S. İşcan, *Educational Policy, Reforms, and Change in the Middle East and North Africa* (1st ed., pp. 268–288). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003599432-17>
- Coldrey, O., LaRocco, P., Lant, P., & Allan, D. (2026). What women want: Financing a gender-responsive clean cooking transition. *Energy Research & Social Science*, 132, 104538. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2026.104538>
- Duong, T. T., & Nguyen, T. B. N. (2026). Smart Tourism Cities and Gender-Inclusive Urban Planning. In A. J. Anand & S. Krishnan, *Smart Technologies for Sustainable Development Goals* (1st ed., pp. 169–186). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003685081-13>
- Durano, F. L. A., Romo, G. D. A., Sarmiento, J. M. P., Lopez, R. A., Hollite, J. B. D., & Padios, P. A. B. (2025). A review of the impacts of laws and policies on the nexus of the fisheries sector and gender in the Philippines. *Marine Policy*, 180, 106810. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2025.106810>
- Enachescu, V.-A. (2026). *Gender Equality And The Transformation Of Educational Cultures*. 0558. <https://doi.org/10.21125/inted.2026.0558>
- Eriyanti, L. D., & Makmur, M. H. (2026). Realizing Gender Responsive Human Rights Through Governance Feminism. *Sexuality, Gender & Policy*, 9(1), e70041. <https://doi.org/10.1002/sgp2.70041>

- Erol, S. Y., & Şahin, G. (2026). Gender equality in forestry employment: How international frameworks and National Gender Agenda are reflected in Türkiye's forest policy. *Forest Policy and Economics*, 187, 103786. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2026.103786>
- Eustacchi, F. (2026). *Inclusive Leaves, Inclusive Lives: The Mexican Paternity Leave Policy and the Gender Equality Quest*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6335594>
- Flink, I., Avildsen, C., Mabunda, M., Yisa, C., Teh, H., & Perez, R. (2024). Mixed methods study supporting the piloting and scaling of a Gender-Responsive Play-Based Learning training package for pre-primary teachers in Rwanda and Mozambique. *Social Sciences & Humanities Open*, 10, 101151. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101151>
- Fuchs, J. L., Onyango, L. A., Hirmer, S., & Tomei, J. (2025). Energy, equity and inclusion: Exploring gender equality and social inclusion in energy planning in Kenya. *Energy Research & Social Science*, 130, 104432. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104432>
- Gebretsadik, T., Alemu, T., & Zenebe, M. (2026). Gender-responsive climate-smart agriculture for sustainable and resilient livelihoods in Southern Ethiopia. *Scientific African*, 32, e03369. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2026.e03369>
- Guinto, M. F. (2026). Effects of Gender Responsive Pedagogy in Promoting Learning Equality in Public Elementary Schools. *International Journal of Sustainability and Advanced Integrated Research*, 2(1), 991–998. <https://doi.org/10.65339/ijrsair.V2.I1.123>
- Ibourk, A., & El Aynaoui, K. (2025). School learning in Morocco: What place for gender equality? *Educational Studies*, 1–30. <https://doi.org/10.1080/03055698.2025.2513679>
- Islam, N., Hasan, S., Ahsan, A., & Jahan, M. (2025). *Contemporary Issues and Problems of Public Administration in Bangladesh* (1st ed.). A H Development Publishing House. <https://doi.org/10.71359/ffr8p910>
- McHolm, S., & Devall-Martin, L. (2026). Advancing Gender Equality and Educational Access through Community-Driven Researched Initiatives in Ethiopia. *Research in Educational Policy and Management*, 8(1), 71–93. <https://doi.org/10.46303/repam.2026.5>
- Munyayi, R., Mapani, B., & Shikangalah, R. (2026). From policy to practice: Evaluating gender mainstreaming in Namibia's water sector. *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, 143, 104287. <https://doi.org/10.1016/j.pce.2026.104287>
- Oktari, R. S., Kamaruzzaman, S., Fatimahsyam, F., Sofia, S., & Sari, D. K. (2021). Gender mainstreaming in a Disaster-Resilient Village Programme in Aceh Province, Indonesia: Towards disaster preparedness enhancement via an equal

- opportunity policy. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 52, 101974. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101974>
- Pratiwi, R. D., & Ximenes, M. (2026). Gender-Responsive Strategic Policy Planning for Relocated Sex Workers: An Inclusive Public Service Governance Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 10(1), 97–131. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v10i1.68507>
- Raewy, C. (2004). *Gender and Power Society, the Person, and Sexual Politics*. Polity Press.
- Rani, & Hemrajani, P. (2025). Gender and Educational Leadership: A Bibliometric Review Using VOSviewer. In M. M. Baba, C. Krishnan, & N. G. Goswami, *Gender Equality and Leadership* (1st ed., pp. 43–67). Apple Academic Press. <https://doi.org/10.1201/9781779643308-3>
- Roy, C. K., & Xiaoling, H. (2022). Achieving SDG 5, gender equality and empower all women and girls, in developing countries: How aid for trade can help? *International Journal of Social Economics*, 49(6), 930–959. <https://doi.org/10.1108/IJSE-12-2020-0813>
- Sass, K., & Edmark, K. (2026). Competitive boys, equality-oriented girls? Evidence on a gender gap in education policy-related opinions among Norwegian youth. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 12(1), 17–32. <https://doi.org/10.1080/20020317.2025.2536242>
- Septania, A. S., & Riyanto, S. (2025). Gender Responsive Migration Policy as an Instrument of Spanish Foreign Policy in the Mediterranean Region (2020–2024). *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 5(2), 261–284. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v5i2.4796>
- Shopina, I. (2026, February 23). Challenges Of Implementing Gender Equality In Ukraine's Academic Environment. *Global Educational Trends: Integration of Science and Practice*. Global Educational Trends: Integration of Science and Practice. <https://doi.org/10.65237/1-1-2026-10>
- Singh Hooda, D. (2026). Gender-responsive budgeting approach: Making public expenditure equitable for gender equality in Haryana, India. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 11(01), 09–31. <https://doi.org/10.46609/IJSSER.2026.v11i01.002>
- Skelton, C., Francis, B., & Smulyan, L. (2006). *The SAGE Handbook of Gender and Education*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=b4CdAAAAMAAJ>
- Stromquist, N. P. (2006). Gender, education and the possibility of transformative knowledge. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 36(2), 145–161. <https://doi.org/10.1080/03057920600741131>
- Struk, O. (2025). Gender-Responsive Budgeting and Its Role in Enhancing Competitiveness. In A. Włodkowska, M. Prokop, & O. Struk, *Gender Equality in*

the EU and Ukraine (1st ed., pp. 135–151). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003610649-12>

Tabbush, C., & Howell, B. (2025). Gender Equality and Climate Policy Scorecard: A framework for assessing country performance on gender-responsive climate action 30 years after Beijing. *Statistical Journal of the IAOS*, 41(3), 705–722.
<https://doi.org/10.1177/18747655251371005>

Unterhalter, E. (2006). Gender, Education and Development. In C. Skelton, B. Francis, & L. Smulyan, *The SAGE Handbook of Gender and Education* (pp. 93–108). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781848607996.n8>

Wagon, L. (2026). Scaling Gender-Responsive Digital Health in the European Union: A Policy Commentary: *Proceedings of the 19th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies*, 603–613.
<https://doi.org/10.5220/0014442500004070>

Yanasari, P., Pratiwi, A., Kusniati, E., & Abdullah, M. S. (2026). The impact of merarik kode' on women's educational Trajectories in Central Lombok. *GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies*, 12(1), 163–176.
<https://doi.org/10.22373/equality.v12i1.33859>

Zabaniotou, A., Boukamel, O., & Tsirogianni, A. (2021). Network assessment: Design of a framework and indicators for monitoring and self-assessment of a customized gender equality plan in the Mediterranean Engineering Education context. *Evaluation and Program Planning*, 87, 101932.
<https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021.101932>